

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PSAK) menetapkan bahwa unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, kewajiban dan ekuitas. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Manajemen dalam tugasnya bertanggungjawabkan perusahaan agar terpenuhinya kepentingan pemerintah, kreditor, dan investor dalam bentuk laporan keuangan. Suatu laporan keuangan agar dapat digunakan dalam mengambil keputusan haruslah mengandung informasi yang terpercaya. Dewi dkk (2014) menyatakan tujuan, prinsip, dan aturan akuntansi harus disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku umum untuk memenuhi laporan keuangan tersebut, agar nantinya pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkan hasil laporan keuangan. Terdapat beberapa prinsip dan postulat dalam laporan keuangan salah satunya prinsip konservatisme.

Menurut Watts (2003) dalam Wistawan dkk (2015) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi.

FASB *Statement of Concepts* No. 2 mendefinisikan “konservatisme sebagai reaksi kehati-hatian pada ketidakpastian dan berusaha untuk menjamin bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam situasi usaha dipertimbangkan secara memadai.”

Penggunaan prinsip konservatisme ini bertentangan dengan *matching concept*. *Matching concepts* dalam mengakui pendapatan maupun biaya harus ada bukti transaksi baru bisa diakui, sedangkan konservatisme walaupun tanpa ada bukti yang obyektif biaya atau kerugian tersebut bisa diakui. Penerapan konservatisme menjadi salah satu alasan tidak begitu diperhatikannya bukti obyektif dalam pengakuan biaya. Prinsip konservatisme menyatakan bahwa biaya, rugi dan hutang harus segera diakui meskipun tidak ada bukti yang kuat dan obyektif. Sementara pendapatan, untung (*gains*) dan aktiva tidak dapat diakui tanpa adanya bukti obyektif.

Konsep penandingan memerlukan pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya cost yang akan dibebankan pada periode yang akan datang. Konservatisme akuntansi memiliki peran dalam teori keagenan untuk menentukan praktik yang paling efisien yang bisa membatasi masalah keagenan.

Dalam praktiknya di perusahaan agen dalam aktifitasnya seringkali tidak sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat pemegang saham. Manajer terkadang memberikan informasi yang tidak sama atau asimetris dengan pemegang saham.

Hal ini yang membuat manajer bisa melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Hidayati (2012) Konservatisme dapat mengurangi asimetri informasi

dan manipulasi laporan keuangan dengan cara membatasi penyajian laba juga memasukkan semua kerugian sudah masuk di dalam laporan keuangan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen dalam melakukan tindakan konservatisme, yaitu risiko litigasi, pajak, kontrak hutang, dan *growth opportunities*. Dewi dkk (2014) menyatakan manajer akan melaporkan keuangan perusahaan secara konservatif untuk menghindari suatu kerugian akibat litigasi, karena jika suatu laba bernilai tinggi maka akan memiliki risiko litigasi yang tinggi pula. Pembayaran pajak juga mendasari digunakannya konsep konservatisme. Suatu pendapatan jika mengalami penundaan, maka akan semakin kecil pengakuan laba yang dilaporkan. Sehingga pembayaran pajak semakin rendah. Suatu sikap manajer dalam halnya mengatasi perjanjian hutang yang sudah jatuh tempo adalah akan menghindari perjanjian tersebut dengan cara memilih suatu kebijakan akuntansi yang akan menguntungkan. Peningkatan jumlah investasi juga akan dilakukan perusahaan atau yang biasa dikenal dengan perusahaan *growth* yang lebih memilih prinsip konservatisme akuntansi.

Dalam penerapannya, prinsip konservatisme masih dianggap sebagai prinsip yang kontroversial. Para pengkritik mengatakan bahwa prinsip konservatisme ini akan menyebabkan informasi dalam laporan keuangan menjadi bias, tidak relevan dan tidak bermanfaat sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat dalam mengevaluasi resiko perusahaan. Bagi pihak yang mendukung prinsip konservatisme menyatakan bahwa prinsip ini sangat bagus karena informasi tentang laba yang dihasilkan lebih berkualitas, karena mencegah perusahaan memanipulasi labanya, mencegah tindakan manajer dalam untuk melakukan

perilaku oportunistik dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*. Penggunaan metode konservatisme menimbulkan adanya cadangan tersembunyi di perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan jumlah investasi perusahaan.

Dikutip dari detikfinance, (29 Juli 2010) - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam perbedaan pencatatan transaksi anak usaha PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), PT Petromine Energy Trading, senilai Rp 1,37 triliun yang ada di laporan keuangan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) mengakui terjadi kesalahan pencatatan laporan keuangan tahun 2010.

Dalam LKT AKRA tercantum transaksi dari Petromine berupa pembelian bahan bakar senilai Rp 1,37 triliun. Transaksi tercatat dalam neraca pendapatan AKRA. Namun pada LKT konsolidasi BNBR, dalam neraca beban pokok pendapatan tidak tercantum transaksi ini. Dimana jumlah beban tersebut mencapai Rp 8,6 triliun. Menurut standar akuntansi keuangan (PSAK) yang berlaku, segala transaksi yang bernilai lebih dari sama dengan 10% dari pendapatan emiten dicatat dalam neraca keuangan. Dengan beban pokok pendapatan Rp 8,6 triliun, maka nilai transaksi Rp 1,37 triliun adalah 15,39%. Untuk itu wajib dicatatkan.

Kasus PT. AKR Corporindo mengindikasikan laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan menunjukkan manajemen di perusahaan bersikap optimis dalam mengakui laba sehingga penerapan konservatisme dalam laporan keuangan rendah.

Selain itu juga PT. Kimia Farma yang telah melakukan manipulasi laporan keuangan yang *overstate* dengan adanya penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar yaitu pada laporan keuangan yang seharusnya adalah Rp 99,594 miliar namun ditulis Rp 132 miliar. Hal ini merupakan suatu bentuk penipuan yang menyesatkan bagi investor dan stakeholders. Kasus ini mengindikasikan rendahnya penerapan prinsip konservatisme oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Penerapan prinsip konservatisme yang kurang baik juga terlihat dari manager yang memiliki ekuitas tinggi di perusahaan akan menggunakan tingkat konservatisme yang lebih rendah untuk menghindari penurunan harga saham. Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak digunakannya lagi prinsip konservatisme akuntansi dalam IFRS. Tingkat manipulasinya cukup besar, sehingga perlu ada prinsip baru yang lebih efektif dibandingkan dengan konservatisme.

Garcia, Beatriz & Penalva (2007) dalam Suleman dan Mutalib (2014) mengatakan tata kelola perusahaan yang buruk dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba di perusahaan. Penerapan pengawasan dalam menangani transaksi tertentu dapat menyebabkan akuntansi konservatif. Dewan direksi dapat menegakkan disiplin para manajemen dengan memastikan praktik akuntansi konservatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Caskey dan Volker (2013) menunjukkan bahwa dengan pengawasan yang lebih kuat terhadap pelaporan keuangan, maka digunakan akuntansi yang lebih konservatif. Optimalitas akuntansi konservatif bergantung pada dewan komisaris yang mampu secara

efektif memantau pelaporan untuk mengurangi sisi negatif dari konservatisme. Perusahaan dengan pengawasan pelaporan yang lemah tidak bisa secara langsung menekan kecurangan manajer. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Anifowose dan Salami (2014) yang menunjukkan bahwa karakteristik dewan komisaris berpengaruh terhadap pelaporan keuangan konservatif.

Menurut Ghofar dkk (2015) Konservatisme ditentukan oleh mekanisme tata kelola perusahaan yang baik yang berkaitan dengan karakteristik dewan direksi (Ahmed dan Duellman 2007; Wardhani 2008). Dewan direksi membutuhkan laporan keuangan yang disajikan dalam jumlah konservatif dengan pertimbangan mempermudah memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan berusaha melindungi kreditur dengan menyajikan laporan keuangan dengan konservatif (Sari et al 2014). Implikasi dari konservatisme adalah laba yang dilaporkan perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya, menyebabkan pembagian dividen bagi pemegang saham rendah. Pembayaran dividen yang rendah mengakibatkan perusahaan mempunyai uang tunai yang cukup untuk membayar hutang (Ratnadi et al., 2013). Sementara itu, Manfaat lain dari konservatisme adalah perusahaan dapat menghindari investasi yang memiliki *Net Present Value* (NPV) negatif. Zhang (2008) dalam Yunos dkk (2012) menunjukkan bahwa konservatisme menguntungkan kreditur dalam hal sinyal awal kemungkinan pelanggaran hutang, karena keuntungan yang dibagikan oleh debitur dengan biaya bunga lebih rendah.

Penerapan *Corporate Governance* dilakukan oleh seluruh pihak dalam perusahaan dengan adanya dewan yang mengelola dan mengawasi kinerja

perusahaan. Dewan direksi sebagai pengelola perusahaan menetapkan kebijakan – kebijakan yang harus diterapkan di dalam perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kinerja direksi dan manajer dalam hal kesesuaian tugas yang dilakukan manajemen perusahaan dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Wisadha dkk (2015) mengatakan supaya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris lebih ketat maka dewan komisaris dapat membentuk komite – komite seperti komite audit, komite nominasi, maupun komite kompensasi atau remunerasi. Hasil penelitian Sari dkk (2014) Dewan komisaris yang lebih konservatif menginginkan kondisi dan kepastian yang lebih aman dalam menyajikan informasi kepada pengguna laporan keuangan, sehingga cenderung menerapkan konservatisme akuntansi. Keputusan dewan direksi yang berbeda dalam menerapkan konservatisme akuntansi menentukan tingkat konservatisme akuntansi.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Menurut wardhani (2008) *Board of directors* yang kuat (*board of directors* yang didominasi oleh komisaris independen) akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas sehingga mereka akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif.

Kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial lebih mementingkan kemajuan perusahaan daripada insentif yang akan diterimanya. Jika jumlah kepemilikan manajerial sedikit, akuntansi yang digunakan perusahaan tersebut kurang konservatif. Kepemilikan manajerial yang tinggi juga berdampak buruk bagi perusahaan karena kedudukannya akan sama dengan pemegang saham lainnya, sehingga punya hak voting yang kuat terhadap pengendalian perusahaan.

Di satu sisi, manajer dengan kepemilikan ekuitas tinggi akan memilih untuk menggunakan tingkat konservatisme yang lebih rendah untuk menghindari penurunan harga saham. Di sisi lain, akuntansi yang lebih konservatif akan digunakan karena kreditor yang rasional akan mengekspektasikan manajer dengan kepemilikan yang tinggi akan lebih sejalan dengan pemegang saham sehingga kreditor tersebut butuh mekanisme tertentu untuk melindungi nilai investasi mereka.

Ukuran dewan komisaris yang terkait dengan jumlah anggota dewan komisaris Ahmed dan Duellman (2007) yang menyatakan bahwa independensi komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris berhubungan positif dengan ukuran dewan. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih khusus dalam mengawasi perusahaan. Spesialisasi yang lebih besar tersebut dapat menunjukkan pengawasan yang lebih efektif. Ukuran dewan komisaris akan mempengaruhi terjadinya akuntansi yang konservatif di perusahaan tersebut.

Komite audit memiliki peran besar dalam sistem pengendalian perusahaan. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian karena komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris ini bertugas untuk melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan terutama dalam hal keuangan. Menurut Wardhani (2008) keberadaan komite audit akan mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit ini akan meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara dewan komisaris dengan konservatisme akuntansi. Hasil penelitian tersebut dipengaruhi oleh berbagai variabel yang berbeda. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Mubarak (2017) dengan judul penelitian "Tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia dan hubungannya dengan karakteristik dewan komisaris sebagai salah satu mekanisme *corporate governance*". Perbedaan penelitian ini adalah penulis menambahkan satu variabel independen yaitu kepemilikan institusional. Alasan penambahan variabel ini adalah adanya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi manajemen dalam menerapkan konservatisme akuntansi. Wardhani (2008) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan maka semakin mendorong penggunaan prinsip akuntansi yang konservatis. Penelitian sebelumnya yang dilakukan pada perusahaan LQ 45 tahun 2013 – 2015 sedangkan penelitian ini tahun 2014 – 2016, Mubarak (2017)

menggunakan variabel kontrol kepemilikan institusional, leverage dan ukuran perusahaan sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel kontrol.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah mekanisme *Good Corporate Governance* dapat menyalurkan hubungan antara manajemen dan pemegang saham dengan cara penerapan akuntansi yang konservatif di perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen terhadap konservatisme akuntansi?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi?
5. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi?
6. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap konservatisme akuntansi?
7. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap konservatisme akuntansi?
8. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap konservatisme akuntansi?

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian tingkat konservatisme disini berdasarkan pada implementasi mekanisme *corporate governance* berkaitan dengan proporsi komisaris independen, kepemilikan manajemen, ukuran dewan komisaris, komite audit dan komisaris institusional. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2016.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi?
2. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi?
5. Apakah komisaris institusional berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi?
6. Apakah proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional, berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap konservatisme akuntansi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap konservatisme akuntansi.
5. Untuk mengetahui pengaruh komisaris institusional terhadap konservatisme akuntansi.
6. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional, terhadap konservatisme akuntansi.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, dapat memahami tentang konservatisme akuntansi, dan mengetahui bagaimana pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi.
2. Bagi Akademis dan peneliti selanjutnya, sebagai tambahan literature yang dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang konservatisme akuntansi.

3. Bagi dewan komisaris dan manajemen, sebagai alat pengawasan dan pengendalian konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Bagi manajemen sebagai salah satu tambahan literature dan pemahaman pentingnya menyajikan laporan keuangan yang bersifat konservatif.



THE
Character Building
UNIVERSITY